

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan adalah penutur dan juga pelaku sejarah yang sama pentingnya dengan laki-laki. Di dalam ruang lingkup sejarah, khususnya di daerah Sumatera Barat hanya segelintir perempuan Minangkabau yang perannya dicatat dalam sejarah seperti, 1) Siti Manggopoh, perempuan biasa yang berani menyerang benteng penjajah (kolonial Belanda) pada tahun 1908. 2) Rohana Kudus sebagai tokoh pahlawan perempuan dan sebagai, pimpinan penerbit surat kabar Soenting Melajoe (1912) yang merupakan surat kabar khusus untuk wanita yang pertama di Indonesia, beliau juga disebut sebagai “pelopor”. 3) Rasuna Said, seorang perempuan Minangkabau yang aktif dalam bidang politik.¹

Perempuan Minangkabau memiliki ruang dan tempat yang cukup unik dalam perkembangan politik. Keunikannya terletak pada porsi yang diberikan pada mereka, seperti yang tertuang dalam naskah maupun kaba klasik yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Aktivitas perempuan dalam percaturan politik Minangkabau sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam politik telah muncul selama Minangkabau itu ada. Ini bisa kita lihat dalam cerita-cerita klasik Minangkabau. Perempuan selalu saja memiliki porsi tersendiri dari setiap kisah yang diceritakan atau dibuat.²

¹Hayati Nizzar, *Bundo Kanduang dalam Kajian Islam dan Budaya*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat), 2004, hlm. 14.

²Lany Verayanti, dkk, *Partisipasi Politik Perempuan : Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilinial*, (Padang : LP2M Padang), 2003, hlm. 27.

Peranan perempuan sangat memberi pengaruh terhadap bidang sosial-ekonomi dan politik. Faktanya sangat banyak perempuan-perempuan yang dipercaya memimpin suatu organisasi bahkan sebuah partai. Hal itu terlihat di daerah Minangkabau yang menganut adat kebudayaan yang masih kental apalagi tentang sebuah kepemimpinan.

Meski terdapat kontroversi tentang hal ini, fakta menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau dalam posisi marginal. Subordinasi perempuan dalam institusi keluarga tercermin dalam rendahnya representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan publik, seperti: DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Badan Perwakilan Nagari, karena secara budaya, perempuan Minangkabau identik dengan "*limpapeh rumah gadang*".

Lain halnya dengan Elly Thrisyanti yang diajak untuk terjun ke dunia politik, khususnya di panggung politik lokal Sumatera Barat yang diwadahi oleh partai Gerindra pada tahun 2013. Perjalanan politik Elly Thrisyanti bisa dikatakan cukup sukses dikarenakan pada tahun 2014 yang merupakan kali pertama Elly Thrisyanti ikut mencalonkan diri ke pemilihan legislatif DPRD kota Padang dan langsung terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang dan pada tahun 2017 Elly Thrisyanti dilantik sebagai ketua DPRD Kota Padang.

Sumatera Barat akhirnya menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya lembaga legislatif DPRD Kota Padang resmi dipimpin seorang perempuan, gedung bundar Sawahan resmi dipimpin oleh Elly Thrisyanti yang menggantikan ketua DPRD sebelumnya Erisman. Elly Thrisyanti dipercaya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menggantikan koleganya Erisman di fraksi Gerindra,

untuk memimpin lembaga legislatif setelah terjadinya konflik internal yang menimpa Erisman. Elly Thrisyanti ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Padang setelah keluar SK Gubernur Sumbar Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Padang.³ Elly Thrisyanti lahir di kota Padang pada tanggal 21 Juni 1967 dan memiliki suami Erizal Syaf. Elly Thrisyanti merupakan anak dari pasangan Achmad Noer dan Theresia, dan memiliki 1 orang saudara yang bernama Any Thrisna. Elly Thrisyanti mempunyai dua orang anak dari hasil pernikahan dengan suaminya Erizal Syaf, anak pertama bernama Fauzan Saputra Rizal dan anak kedua bernama Zata Qamarina.

Misi Elly Thrisyanti terjun sebagai anggota legislatif adalah untuk mendorong percepatan pembangunan kota Padang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perjalanan Elly Thrisyanti dalam menempuh karir barunya sebagai politikus tidaklah mudah dan Elly Thrisyanti termasuk orang awam dalam dunia politik dikarenakan dia berpartisipasi dalam politik setahun sebelum dia mengikuti pemilihan umum calon legislatif. Elly Thrisyanti mendapat kesempatan dalam pencalegan dari partai Gerindra dikarenakan setiap partai yang ikut pemilihan mewajibkan 30% wanita ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif dan kesempatan ini didapat dari suami Elly Thrisyanti yang mana telah lebih dahulu berkecimpung dalam kepengurusan partai, khususnya Partai Gerindra.

Alasan lainnya Erizal Syaf mengajak Elly Thrisyanti untuk ikut dalam kepengurusan partai Gerindra yaitu karena Elly Thrisyanti pada masa kuliah aktif di organisasi Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan

³Sumbar. Antaranews.com diakses pada tanggal 19 Oktober pukul 21.08 WIB

menjabat sebagai bendahara selama dua periode. Dengan kata lain keberadaan Elly Thrisyanti untuk terjun dalam politik karena "hasutan" suaminya sendiri.⁴

Perjuangan Elly Thrisyanti ketika telah terpilih menjadi anggota DPRD harus mengorbankan banyak hal dari kehidupan Elly Thrisyanti sebelumnya, seperti membagi waktu dengan keluarga untuk mengemban tugas politik dan Elly Thrisyanti harus meninggalkan jabatan sebelumnya sebagai ketua Yayasan Raudhatul Ar-royyan (yayasan yang bergerak di bidang pendidikan). Meskipun begitu perjuangan yang dilakukan Elly Thrisyanti terbalas dengan beberapa penghargaan yang diterima dari Partai Gerindra seperti Sertifikat BIMTEK (Bimbingan Teknis) anggota DPRD propinsi dan kabupaten/kota Partai Gerindra yang dilaksanakan oleh Dewan pimpinan pusat Gerindra tanggal 11 April 2018 sampai 12 April 2018 bertempat di Padepokan Garudayaksa Partai Gerindra, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) anggota DPRD propinsi dan kabupaten/kota Partai Gerindra bertempat di Hambalang 6 November 2016.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang biografi dari seorang Elly Thrisyanti. Penulisan biografi dapat dibedakan berdasarkan waktu dan biografi berdasarkan susunan menurut topik (tematis) adalah penulisan biografi yang difokuskan kepada karir atau pekerjaan yang ditekuni oleh seorang tokoh, yang

⁴Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab III Pasal 8 ayat 2.

ketiga penulisan biografi yang menyatukan antara kronologis dan tematis atau biografi gabungan.⁵

Biografi sebagai alat untuk mencapai pembaharuan moral, dan mengharapkan pembacanya menjadi agen pembaharu mengandung unsur-unsur positif, jika dilengkapi dengan bahasa yang indah dan komunikatif bagi pembacanya, maka sempurna biografi sebagai salah satu jenis karya sastra yang bernilai sejarah.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk menulis dan meneliti biografi Elly Thrisyanti. Biografi ini menggambarkan bagaimana Elly Thrisyanti sebagai seorang perempuan yang memimpin lembaga legislatif DPRD Kota Padang dan sekaligus menjadi wanita pertama yang memimpin DPRD Kota Padang. Penulisan ini akan melihat dari sisi kehidupan Elly Thrisyanti tentang riwayat hidup dan karir politik. Dengan ini penulis memberi judul **“Elly Thrisyanti: dari Pemimpin Sekolah menjadi Ketua DPRD Kota Padang”**.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih berfokus maka perlu ditetapkan batasan permasalahan, baik batasan temporal maupun batasan spasial. Batasan awal dari penelitian ini adalah tahun 2011, ini merupakan masa Elly Thrisyanti menjabat sebagai Ketua Yayasan Rhaudatur Royyan. Kemudian 2019 diambil sebagai batasan akhir karena pada tahun ini Elly Thrisyanti membuktikan kinerja Ketua

⁵Leirissa R.Z, *Suatu Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokakarya*, (Jakarta: Depdikbud), 1993, hlm. 43.

⁶David Tibalasari, *Sastra dan Sejarah Saudara Ilmu Humaniora*, (Yogyakarta: Balairung UGM), 1999, hlm. 21

DPRD Kota Padang. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah kota Padang, karena kantor DPRD ini berada di daerah Sawahan Kota Padang. Agar penulisan ini lebih terarah dan terfokus maka ada beberapa persoalan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana kehidupan masa kecil Elly Thrisyanti?
2. Bagaimana Elly Thrisyanti melalui masa pendidikannya ?
3. Apa saja peran Elly Thrisyanti sebagai pemimpin?
4. Mengapa Elly Thrisyanti dapat menjadi Ketua DPRD Kota Padang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu :

1. Melihat kehidupan masa kecil Elly Thrisyanti
2. Mendeskripsikan tentang masa pendidikan Elly Thrisyanti
3. Menjelaskan peran Elly Thrisyanti sebagai pemimpin
4. Menganalisa perjalanan karir dari Elly Thrisyanti sehingga dapat mejadi Ketua DPRD Kota Padang.

Manfaat dari penelitian ini yaitu agar masyarakat dapat mengetahui perjuangan dari seorang Elly Thrisyanti dalam mencapai jabatannya saat ini. Hal lainnya yaitu agar menjadi sebuah pelajaran dan informasi untuk para akademisi, peneliti, dan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian dilakukan studi pustaka terlebih dahulu seperti buku, skripsi, karya ilmiah dan lain sebagainya. Buku yang ditulis oleh Lany Verayanti, dkk⁷ yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan: Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal”. Buku ini menjelaskan tentang peranan Bundo Kanduang sebagai salah satu lembaga adat Minangkabau yang menyangkut posisi kaum perempuan dan merupakan sistem perlindungan kaum perempuan dalam sistem adat nagari. Bundo Kanduang kelihatannya merupakan salah satu bentuk adat penting dalam sistem adat Minangkabau, yang seharusnya menjadi dambaan untuk perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan Minangkabau. Sebagai institusi adat yang sesungguhnya mendapat mandat dan seharusnya paling berkepentingan dalam memberikan perlindungan dan perjuangan hak-hak kaum perempuan Minangkabau, justru semakin dilemahkan peran dan fungsinya dalam sistem adat Minangkabau saat ini.

Bundo Kanduang yang seharusnya merupakan tempat untuk berlindung bagi kaum perempuan Minangkabau untuk dapat mencegah dari segenap proses dehumanisasi, celakanya, justru dilemahkan peran dalam sistem politik pengambilan keputusan adat Minangkabau. Tanpa penguatan Bundo Kanduang, adat bisa jadi menjadi majelis yang justru mengerikan bagi kaum ibu, karena adat dapat justru menjadi arena pengukuhan atau pelanggaran diskriminasi dan legitimasi terhadap siksaan psikologis maupun kultural dalam bentuk penciptaan ketergantungan bagi kaum ibu.

⁷Lany Verayanti, *loc. cit.*

Dari penjelasan buku yang ditulis oleh Lany Verayanti diatas, dapat disimpulkan bahwa adat menjadi sebuah momok besar bagi kaum perempuan Minangkabau. Hal itu dikarenakan adat Minangkabau yang seperti kita ketahui dalam pengambilan keputusannya banyak melibatkan kaum pria dibandingkan kaum wanita. Hal tersebut menyebabkan peranan kaum perempuan dalam sistem politik adat Minangkabau terlemahkan.

Dari paparan penjelasan diatas, hal ini tentu selaras dengan tema dari penelitian yang akan dikaji. Tema dari penelitian ini yakni mengenai perjuangan seorang wanita Minangkabau dalam karirnya dibidang politik. Meskipun terdapat perbedaan dari buku karya Lany, yaitu perjuangan Elly Thrisyanti dalam bidang politik dan bagaimana beliau dapat mencapai jabatannya tidak bersangkut paut dengan adat istiadat di Minangkabau. Tetapi buku tersebut dapat dijadikan referensi acuan dalam penelitian yang akan dikaji ini.

Lia Wulandari⁸ dalam bukunya yang berjudul “Peta Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2014: Perempuan dalam Partai Politik, Pemilu, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”. Buku ini membahas tentang persamaan konsep warga negara di hadapan hukum dan politik. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.” Terkait isu keterwakilan politik perempuan di parlemen dalam pandangan kesamaan, menyatakan masalah perempuan bisa terselesaikan ketika hak politik perempuan dipulihkan, baik hak memilih maupun hak dipilih.

⁸Lia Wulandari, *Peta Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2014: Perempuan dalam Partai Politik, Pemilu, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif*, (Jakarta Selatan: Rumahpemilu.org), 2013.

Boestami⁹ dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan dan Peran Wanita: dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau”. Buku ini menggambarkan bagaimana kedudukan dan peranan wanita pada suku bangsa Minangkabau. Mulai dari mengurus anak, kadang-kadang membantu perekonomian rumah tangga, menyediakan persiapan untuk upacara sampai memelihara harta pusaka, karena Minangkabau mengenal sistem matrilineal, dimana wanita berhak atas harta warisan.

Mochtar Naim¹⁰ dalam bukunya yang berjudul “Tiga Menguak Tabir: Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan”. Buku ini membahas mengenai peranan adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau terhadap kehidupan wanita, pergeseran fungsi wanita di Minangkabau, serta wanita di mata hukum dan kenyataan dalam masyarakat.

Gadis Arivia¹¹ dalam bukunya yang berjudul “Feminisme: Sebuah Kata Hati”. Buku ini membahas mengenai feminisme selama sepuluh tahun dimulai sejak tahun 1995 hingga 2005. Tulisan ini mengangkat persoalan kekerasan terhadap perempuan, mempermasalahkan penjualan anak dan perempuan Indonesia, serta perjuangan kuota 30 persen untuk perempuan dalam politik hingga gairah turun ke jalanan berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia pada bulan Februari 1998.

⁹ Boestami, dkk, *Kebudayaan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, (Padang: CV Esa Padang), 1992.

¹⁰ Mochtar Naim, *Tiga Menguak Tabir: Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Hasanah), 2006.

¹¹ Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2006.

Sri Setyawati¹² dalam bukunya yang berjudul “Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai: Perempuan, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Buku ini membahas salah satunya mengenai partisipasi politik perempuan Minangkabau dalam lembaga formal dan informal studi kasus di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai gerakan perempuan Minangkabau sekarang tinjauan antropologi jender.

Reni Nuryanti¹³ dalam bukunya yang berjudul “Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI”. Buku ini membahas mengenai pengalaman luar biasa dari perempuan-perempuan biasa pada masa konflik dan perang. Perempuan-perempuan yang dipaparkan dalam buku ini merupakan saksi mata sekaligus pelaku yang terlibat langsung di berbagai peristiwa pada masa Dewan Banteng dan PRRI. Peristiwa tersebut mengguncang mental masyarakat Sumatera Barat, tidak terkecuali dengan perempuan Minangkabau. Mereka tidak jarang mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

Karya selanjutnya jurnal politik yang ditulis oleh Zainal Mukarom¹⁴ dengan judul “Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterlibatan Perempuan di Legislatif”. Jurnal ini membahas mengenai kurangnya jumlah keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga politik formal. Rendahnya keterlibatan perempuan di panggung politik dipengaruhi oleh

¹²Sri Setyawati, *Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai: Perempuan Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Adat*, (Padang: Andalas University Press), 2006.

¹³Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2011.

¹⁴Zaenal Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, *Jurnal MediaTor*, Vol. 9 No. 2. Desember 2008.

beberapa faktor, diantaranya:*pertama*, masalah sosialisasi politik yang cenderung menggiring perempuan untuk mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri. *Kedua*, masalah krusial, dimana peran perempuan sebagai ibu membuat perempuan tidak memiliki banyak waktu untuk bekerja sehingga ada ketidakmungkinan menerima jabatan politik tertentu.

Aisah Putri Budiatri¹⁵, “Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia”. Jurnal ini membahas mengenai rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen yang tidak sebanding dengan jumlah perempuan yang hampir separuh dari jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya komitmen negara untuk menjalankan aksi afirmasi, khususnya dalam proses pemilihan umum. Aksi afirmasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan kursi perempuan di parlemen. Pada dasarnya, aksi afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan telah dijalankan Indonesia pada dua pemilu terakhir (2004 dan 2009), namun tidak efektif.

E. Kerangka Analisis

Studi ini menjadi kajian biografi yaitu biografi Elly Thrisyanti. Biografi ini menggambarkan tentang bagaimana seorang Elly Thrisyanti sebagai Ketua Yayasan Rhaudatur Royyan hingga menjadi anggota DPRD Kota Padang dan diangkat menjadi ketua DPRD. Untuk itu dalam penelitian ini, perlu dibahas mengenai konsep dari biografi itu sendiri.

¹⁵ Aisah Putri Budiatri, Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia, *Jurnal Studi Politik* Vol. 1 No. 2, 2011.

Biografi adalah rangkaian kisah nyata dari kehidupan seseorang yang diuraikan secara tertulis oleh orang lain, memiliki bukti yang lengkap, penyajian dalam bentuk uraian yang indah dan artistik sehingga menggambarkan utuh kepribadian seseorang.¹⁶ Studi Biografi itu berusaha untuk mengungkapkan aktifitas individu secara lengkap dalam konteks historis. Sebuah penulisan biografi baik tentang tingkah laku politik, kepemimpinan, pemikiran, maupun perjuangan seseorang tidak saja akan diketahui riwayat tetapi dari uraian itu juga tergambar situasi dan kondisi masyarakat yang mengelilingi si tokoh semasa hidupnya.¹⁷

Penulisan biografi Elly Thirsyanti termasuk kepada penulisan biografi tematis. Sebagai biografi tematis penulisan biografi Elly Thirsyanti ini memfokuskan pada masa Elly Thirsyanti aktif di bidang sosial hingga Elly Thirsyanti aktif di bidang politik khususnya di DPRD Kota Padang. RZ Leirissa menyatakan bahwa sebuah penulisan sejarah tentang biografi dapat diwujudkan melalui watak pribadi atau seseorang, yakni tokoh dalam biografi tersebut.¹⁸

Konsep selanjutnya yang dipakai adalah konsep sejarah politik karena penelitian ini berkaitan erat dengan sejarah politik. Sebagai konsekuensi dari sejarah baru, sejarah politik menurut model sejarah lama yang mengutamakan diplomasi dan perang serta peranan tokoh-tokoh besar dan pahlawan sudah tidak lagi memuaskan para sejarawan. Pemaparan deskriptif-naratif pada sejarah politik gaya lama digantikan dengan analisis kritis-ilmiah karena sejarah politik model baru telah menggunakan pendekatan dari berbagai ilmu-ilmu sosial. Cakrawala

¹⁶ PT.Cipta Adi Pustaka *Ensiklopedia Nasional Jilid 3*.(Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1989).hlm. 380.

¹⁷RZ Leirissa. *Biografi dan Sejarah, dalam Pemikiran Biografi dan Kesejahteraan Suatu Kumpulan Sarana pada Beberapa Lokakarya*.(Jakarta: Depdikbud, 1983).hlm. 58.

¹⁸*Ibid*, hlm. 59-60.

analisis semakin luas dan mendalam karena yang dibahas seperti soal struktur kekuasaan, kepemimpinan, para elit, otoritas, budaya politik, proses mobilisasi, jaringan-jaringan politik dalam hubungannya dengan sistem sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tidak jarang pemilihan umum dan perilaku para pemilih (*electoral behavior*) menjadi kajian dengan penggunaan analisis kuantitatif. Peranan komputer cukup besar dalam memproses ratusan biografi dan mentest kebenaran (verifikasi) kecenderungan arah dan luas cakupan mobilitas sosial. Salah satu contoh sejarah politik di Indonesia telah pula ditulis, misalnya oleh Alfian pada 1970 yang berjudul *Islamic Modernism in Indonesian Politics : The Muhammadiyah During Colonial Period*, disertasinya di University of Wisconsin, Amerika Serikat. Pemilihan umum semasa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi akan sangat menarik ditulis dalam kerangka sejarah politik baru, terutama bagaimana rakyat menggunakan hak-hak pilih mereka dan perilaku para elit politik.¹⁹

Kemudian diperlukan sebuah konsep elit politik untuk lebih menekankan dasar pemikiran dari penelitian ini. Ortega Y. Gasset (1833-1955) mengembangkan teorinya tentang massa. Menurut Ortega, kebasaran suatu kebangsaan suatu bangsa tergantung pada kemampuan “rakyat”, “masyarakat umum”, “kerumunan”, “massa” untuk menemukan “simbol dalam orang pilihan tertentu, kepada siapa mereka mencurahkan segala antusiasme vital mereka yang sangat luas”. “Orang terpilih” adalah orang-orang yang terkenal dan merekalah yang membimbing “massa”, yang tidak terpilih seperti mereka. “Suatu bangsa merupakan suatu massa manusia yang

¹⁹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak), 2012, hlm. 252.

terorganisasi, yang disusun oleh suatu minoritas individu yang terpilih. Bentuk hukum yang akan dipergunakan suatu Negara dapat berupa hukum yang demokratis atau komunis, tetapi kehidupan dan konstitusi ekstra-legalnya akan senantiasa mengandung pengaruh dinamis dari suatu minoritas yang bertindak diatas massa.²⁰

Supaya penulisan ini lebih terarah, maka konsep yang dipakai selanjutnya adalah konsep keterwakilan perempuan. Dalam UUD tidak ada yang namanya “laki-laki” dan “perempuan”, yang ada hanyalah kata-kata “orang-orang”, “seluruh rakyat”, “penduduk”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, dan “setiap orang”. Hal itu semua menunjukkan bahwa konstitusi mengakui adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara. Untuk itu, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sama dijamin konstitusi. Di bidang hukum dan politik, kedudukan laki-laki dan perempuan setara, karena menurut UUD 1945 setiap warga negara mempunyai kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun para perumus konstitusi menyadari bahwa, kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam konstitusi tersebut, tidak serta merta mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari catatan sejarah nasional maupun sejarah banyak negara lain, di mana hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.²¹

²⁰SP.Varma, *op ., cit.*, hlm.207.

²¹Lia Wulandari,*op.,cit.*,hlm.9-10.

F. Metode penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan sejarah. Metode penulisan sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²²

Tahap pertama penelitian adalah heuristik, yaitu mengumpulkan data. Penelitian ini tentang biografi Elly Thrisyanti, maka data-data utama yang dipakai adalah data-data yang bersangkutan dengan Elly Thrisyanti, seperti akte kelahiran, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah kuliah, ijazah akuntan, akte pengangkatan ketua Yayasan Raudhatur Royyan, surat keputusan DPP (Sewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra, dan SK Pengangkatan Pimpinan DPRD. Untuk mendukung penulisan, maka penulis akan melakukan wawancara dengan Elly Thrisyanti, Erizal Syaf, staf Yayasan Raudhatur Royyan, dan Syamsul anggota DPRD Kota Padang. Sementara pengumpulan data tertulis pendukung penelitian ini dilakukan dengan cara studi perpustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan studi literature dengan memakai sumber berupa koran dan arsip. Berdasarkan penelusuran di berbagai pustaka tersebut, diharapkan mendapatkan buku penunjang seperti buku mengenai perempuan dan politik maupun koran mengenai Elly Thrisyanti.

²²Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : UI Press), 1985, hlm. 50.

Setelah sumber terkumpul maka dilakukan kritik sumber sebagai bentuk tahapan yang kedua. Kritik juga dapat disebut dengan penganalisaan sumber atau menilai sumber-sumber.²³ Kritik tersebut bersifat kritis internal guna melihat kebenaran sumber dan kritik eksternal yang melihat sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Tahap ini bertujuan untuk melihat otensias dan kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang penulis kumpulkan yang berkaitan dengan judul atau tidak.

Tahap ketiga adalah melakukan interpretasi. Setelah melakukan kritik intern, kita telah dapat menghimpun banyak informasi. Berdasarkan segala keterangan itu dapat disusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya.²⁴ Dalam tahapan interpretasi ini dapat penulis menafsirkan hubungan data atau sumber, sehingga memudahkan pelaksanaan tahap keempat.

Tahap keempat penelitian adalah historiografi, yaitu tahap terakhir dalam metode sejarah. Pada tahap ini dilakukan penulisan tentang biografi Elly Thrisyanti: dari aktivis sosial menjadi Ketua DPRD Kota Padang.

G. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan masalah dan pembahasan mengenai judul dari penelitian ini, terdapat 5 bab yang akan menjelaskannya secara rinci. Kelima bab ini tersusun secara berurut menurut dari rumusan masalah yang akan di kaji.

²³Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan tradisi ABRI, 1998), hlm.23.

²⁴*Ibid.* hlm.26.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka analisis metode penelitian dan bahan-bahan yang dijadikan sumber. Bab ini diperlukan untuk menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini. Agar nantinya pembahasan penelitian ini tidak melenceng terlalu jauh.

Bab II merupakan penjelasan mengenai masa pendidikan Elly Thrisyanti sehingga menjadi landasan untuk Elly Thrisyanti menjadi pemimpin Yayasan Rhaudatur Royyan

Bab III merupakan pengenalan awal tentang kehidupan Elly Thrisyanti sebagai Ketua Yayasan Rhaudatur Royyan sehingga landasan awal yang mempengaruhi Elly Thrisyanti dapat terjun ke dunia politik.

Bab IV merupakan penjelasan bagaimana perjalanan karir politik Elly Thrisyanti untuk menjadi anggota DPRD Kota Padang dan menjelaskan faktor yang mendukung Elly Thrisyanti untuk menjadi anggota DPRD Kota Padang hingga dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Padang.

Bab V merupakan bab kesimpulan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang rumusan masalah penelitian.



